

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SORONG



LAPORAN KEUANGAN SEMESTER II TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong . Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sorong, 18 Januari 2025

Kepala,



Nikmatul Rochmah, S.St.Pi



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	2
II. Neraca	3
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	10
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	11
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	27
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	45
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	52
F. Pengungkapan Penting Lainnya	55
VI. Lampiran dan Daftar	54



**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN SORONG**
*JL. Ahmad Yani – Kuda Laut (Kompleks Pelabuhan Perikanan Pantai)
Sorong – Papua Barat Daya*
TELEPON 0951 325671, FAXIMILE 0951 332522

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sorong, 18 Januari 2025



Kepala

Nikmatul Rochmah, S.St.Pi



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Satuan Kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara LK AUDITED pada TA 2024 adalah sebesar Rp.216.612.650 atau mencapai 141 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.153.475.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp. 4.454.075.446 atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.4.488.194.000.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp.2.327.469.874 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 122.819.022 ; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 2.204.650.852 ; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.11.732.764 dan Rp. 2.315.737.110

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 175.370.000-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. (4.650.581.556,-) sehingga terdapat surplus/defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 4.475.211.556. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.41.242.650 dan sebesar Rp.00 sehingga entitas mengalami surplus/defisit-LO sebesar Rp. 4.433.968.906



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 4.209.379.641,- dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp.4.433.968.906,-) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 2.540.326.375,- sehingga Ekuitas Akhir entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp. 2.315.737.110,-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN SORONG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	Th 2024				Th 2023
		Anggaran	Realisasi	Realisasi Diatas (Dibawah)	%	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	B.1					
Penerimaan Perpajakan	B.2	0	0	0	0,00	0
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.3	153.475.000	216.612.650	63.137.650	141,00	158.765.000
Penerimaan Hibah	B.4	0	0	0	0,00	0
Jumlah Pendapatan dan Hibah		153.475.000	216.612.650	63.137.650	141,00	158.765.000
Belanja	B.5					
Belanja Pegawai	B.6	1.885.058.000	1.882.246.289	(2.811.711)	100,00	3.156.383.305
Belanja Barang	B.7	2.603.136.000	2.571.829.157	(31.306.843)	99,00	3.202.495.973
Belanja Modal	B.8	00	00	00	00	158.623.200
Belanja Bantuan Sosial	B.9	0	0	0	0,00	0
Jumlah Belanja		4.488.194.000	4.454.075.446	(34.118.554)	99,00	6.517.502.478

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



II. NERACA

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SORONG NERACA

PER 31 Desember 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	0	0
Piutang Perpajakan	C.1.4	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.1.5	0	0
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.6	0	0
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.7	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	C.1.8	0	0
Beban Dibayar di Muka	C.1.9	30.258.600	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.10	0	0
Persediaan	C.1.11	92.560.422	81.083.309
JUMLAH ASET LANCAR		122.819.022	81.083.309
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	0	256.404.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	5.136.427.033	5.730.162.158
Gedung dan Bangunan	C.2.3	1.479.924.000	3.201.313.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	140.667.000	140.667.000
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	55.400.000	55.400.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6h	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(4.607.767.181)	(5.238.477.780)
JUMLAH ASET TETAP		3.906.898.023	4.145.468.378
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3		
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1	0	0
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.3.2	0	0
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.3.3	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	C.3.4	0	0
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		0	0
ASET LAINNYA	C.4		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	C.4.1	0	0
Aset Tak Berwujud	C.4.2	0	0
Aset Lain-lain	C.4.3	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.4	0	0
JUMLAH ASET LAINNYA		0	0
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5		



Uang Muka dari KPPN	C.5.1	0	0
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.2	11.732.764	17.172.046
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.3	0	0
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.5.4	0	0
Utang yang Belum Ditagihkan	C.5.5	0	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.5.6	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		11.732.764	17.172.048
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	C.6		
Kewajiban Konsesi Jasa	C.6.1	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0	0
JUMLAH KEWAJIBAN		11.732.764	17.172.048
EKUITAS			
Ekuitas	C.7	2.315.737.110	4.209.379.641
JUMLAH EKUITAS		2.315.737.110	4.209.379.641
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.327.469.874	4.226.551.687

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



III. LAPORAN OPERASIONAL**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN SORONG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023***(Dalam Rupiah)*

Uraian	Cat.	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	0	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2	175.370.000	158.765.000
Pendapatan Hibah	D.3	0	0
JUMLAH PENDAPATAN		175.370.000	158.765.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.4	1.882.246.289	3.156.383.305
Beban Persediaan	D.5	71.751.224	85.624.207
Beban Barang dan Jasa	D.6	1.529.979.654	2.017.822.897
Beban Pemeliharaan	D.7	366.554.455	361.769.507
Beban Perjalanan Dinas	D.8	561.479.579	751.583.421
Beban Barang untuk Diserahkan ke Masyarakat	D.9	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.10	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.11	238.570.355	526.067.856
Beban Penyusutan Piutang Tak Tertagih	D.12	0	0
JUMLAH BEBAN		(4.680.840.156)	(6.899.251.193)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		4.475.211.556	6.740.486.193
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset		20.452.000	(29.693.930)
Pendapatan Pelepasan Aset		(20.452.000)	0
Beban Pelepasan Aset		0	(29.693.930)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		20.790.650	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(20.790.650)	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11	41.242.650	(29.693.930)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		4.433.968.906	6.770.180.123



POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan Luar Biasa		0	0
Beban Luar Biasa		0	0
JUMLAH POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS (DEFISIT) LO		4.433.968.906	6.770.180.123

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN SORONG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	4.209.379.641	4.617.074.786
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(4.433.968.906)	(6.770.180.123)
DAMPAK AKUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			0
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	E.4.3	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.4	0	0
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	2.540.326.375	6.362.484.978
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(1.893.642.531)	(407.695.145)
EKUITAS AKHIR	E.6	2.315,737.110	4.209.379.641

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Satuan Kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis

Satuan Kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor 2005/BALAP.007/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal dan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Entitas. Satuan Kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan. Untuk mewujudkan tujuan di atas, Satuan Kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong berkomitmen dengan misi "**mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan. Melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang berkualitas.**" Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
2. Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan,
3. Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya,
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satuan Kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan



Keamanan Hasil Perikanan Sorong. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3 Basis Akuntansi

Satuan Kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satuan Kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.



A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.



Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:



Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan



operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset LAINLAIN pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun



Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit	10 tahun



Terpadu	
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset LAINLAIN berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan atas
Pos Laporan
Realisasi
Anggaran

Satuan Kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.4.488.194.000.-. Anggaran dan Realisasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2024

Uraian	Tahun Anggaran 2024	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin	0	20.452.000
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	20.790.650
Pendapatan PNB	153.475.000	175.370.000
Pendapatan Hibah	0	0
Jumlah Pendapatan	153.475.000	216.612.650
Belanja		
Belanja Pegawai	1.885.058.000	1.882.246.289
Belanja Barang	2.603.36.000	2.571.829.157
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	4.488.194.000	4.454.075.446

B.1 Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp216.612.650

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 216.612.650,- atau mencapai 141 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.153.475.000,- Pendapatan Satuan Kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong rincian sebagai berikut:



Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024		%
	Anggaran	Realisasi	
Pendapatan Perpajakan	0	0	0,00
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	153.475.000	216.612.650	141,00
Pendapatan Hibah	0	0	0,00
Jumlah	153.475.000	216.612.650	141,00

Realisasi pendapatan berupa pengujian laboratorium Mutu Eksport, pengembalian belanja tahun lalu dan pendapatan atas penjualan peralatan dan mesin pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Pendapatan Perpajakan	0	0	0,00
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	216.612.650	158.765.000	26,70
Pendapatan Hibah	0	0	0,00
Jumlah	216.612.650	158.765.000	26,70

Pendapatan
Perpajakan Rp0

B.2 Pendapatan Perpajakan

Realisasi Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

Perbandingan Realisasi Pendapatan Perpajakan
TA 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Jumlah Pendapatan Kotor	0	0	0,00



Pengembalian Pendapatan Perpajakan	0	0	0,00
Jumlah Pendapatan	0	0	0,00

B.3 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

*Pendapatan PNBP
Rp173.072.650*

Realisasi Pendapatan PNBP untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp173.072.650 dan Rp124.350.000.

Perbandingan Realisasi Pendapatan PNBP TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Pendapatan PNBP	175.370.000	158.765.000	9
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	17.491.700	0	100
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	3.298.950	0	100
Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin	20.452.000	0	100
Jumlah Pendapatan Kotor	216.612.650	158.765.000	26,70
Pengembalian Pendapatan PNBP	0	0	0,00
Jumlah Pendapatan	216.612.650	158.765.000	26,70

B.4 Pendapatan Hibah

*Pendapatan
Hibah Rp0*

Realisasi Pendapatan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.



Perbandingan Realisasi Pendapatan Hibah
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Jumlah Pendapatan Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Pendapatan Hibah	0	0	0,00
Jumlah Pendapatan	0	0	0,00

B.5 Belanja

*Realisasi Belanja
Rp.4.454.075.446*

Realisasi Belanja Kantor Stasiun KIPM Sorong pada TA 2024 adalah sebesar Rp.4.454.075.446 atau 99 % dari anggaran belanja sebesar Rp.4.488.194.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	1.885.058.000	1.882.246.289	100
Belanja Barang	2.603.136.000	2.571.829.157	99
Belanja Modal	0	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
Total Belanja Kotor	4.488.194.000	4.454.075.446	99
Pengembalian Belanja Pegawai	0	3.298.950	100
Pengembalian Belanja Barang	0	17.491.700	100
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Pengembalian Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
Jumlah	4.488.194.000	4.454.075.446	99



Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 32,45 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Menurunnya Belanja Pegawai karena adanya reorganisasi BKIPM yang sebagian pegawainya beralih ke Badan Karantina Indonesia.
2. Menurunnya Belanja Barang yang disebabkan adanya pengurangan terkait anggaran belanja barang yang sebagian anggarannya beralih ke Badan Karantina Indonesia.
3. Menurunnya Belanja Modal disebabkan karena pada tahun 2024 tidak terdapat belanja modal.

Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Pegawai	1.882.246.289	3.156.383.305	(40,36)
Belanja Barang	2.571.829.157	3.202.495.973	(19,69)
Belanja Modal	0	83.950.000	(100)
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Jumlah	2.989.951.677	4.426.268.569	(32,45)

Belanja Pegawai
Rp1.882.246.289

B.6 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.1.882.246.289 dan Rp.3.156.383.305 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai TA 2024 mengalami penurunan sebesar 40,36 persen dari TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya perpindahan pegawai sebanyak 12 orang ke Badan Karantina Indonesia.
2. Pemberhentian Gaji pegawai dan Uang Makan yang telah



beralih ke Badan Karantina Indonesia semenjak bulan Maret 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	937.851.024	2.135.862.663	(56,10)
Belanja Lembur	86.652.000	106.075.000	(18,32)
Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	857.734.585	914.445.642	(6,20)
Jumlah Belanja Kotor	1.882.246.609	3.156.383.305	(40,36)
Pengembalian Belanja Pegawai	3.298.950	0	100,00
Jumlah Belanja	1.882.246.609	3.156.383.305	(40,36)

Belanja Barang
Rp.2.571.829.157

B.7 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.2.571.829.157 dan Rp3.202.495.973. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami penurunan 19,69 % dari Realisasi Belanja Barang TA 2023. Hal ini disebabkan, antara lain:

1. Pengurangan anggaran belanja barang yang semula Rp.2.996.708.000 setelah revisi menjadi Rp.2.603.136.000
2. Adanya beberapa wilayah kerja yang sudah tidak beroperasi karena seluruh kegiatan dialihkan ke UPT.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Barang Operasional	925,724,426	1.497.496.320	(38,18)
Belanja Barang Non Operasional	133,161,180	187.721.518	(29,06)
Belanja Persediaan	83,120,597	85.624.207	(2,92)
Belanja Jasa	506,794,130	318.301.000	37,19



Belanja Pemeliharaan	361,551,445	361.769.507	(0,06)
Belanja Perjalanan Dinas	561,479,579	751.583.421	(25,29)
Jumlah Belanja Kotor	2.571.829.157	3.202.495.973	(19,69)
Pengembalian Belanja Barang	0	0	0,00
Jumlah Belanja	2.571.829.157	3.202.495.973	(19,69)

Belanja
Rp0

Modal **B.8 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.83.950.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar 100% dibandingkan TA 2023 disebabkan tidak adanya belanja modal pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	83.950.000	(100)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	83.950.000	(100)
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	0	83.950.000	(100)

Belanja
Tanah Rp0

Modal **B.8.1 Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.



Perbandingan Realisasi Belanja Tanah
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	0	0	0,00

B.8.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp0,- Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 adalah sebesar Rp0,- mengalami penurunan sebesar 100 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp83.950.000. Hal ini disebabkan tidak adanya belanja modal peralatan dan mesin TA.2024.

Perbandingan Realiasi Belanja Peralatan dan Mesin
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	83.950.000	(100)
Jumlah Belanja Kotor	0	83.950.000	(100)
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	0	83.950.000	(100)

B.8.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0 Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.



Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	0	0	0,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

B.8.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	0	0	0,00



Belanja Modal
Lainnya Rp0

B.8.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	0	0	0,00

Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.9 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00

Aset Lancar
Rp122.819.022

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.122.819.022,- dan Rp.81.083.309,- Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Penngeluaran pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil



Periklanan Sorong per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Uang Tunai	0	0
Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 650956497111000		0
Jumlah	0	0

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0,.

Tabel xx

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Uang Tunai	0	0
-	0	0
Jumlah	0	0

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp0

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	0	0
Kas Lainnya di K/L Dana Kelolaan LPP RRI/TVRI	0	0
Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi	0	0
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	0	0
Jumlah	0	0



Piutang Perpajakan
Rp0

C.1.4. Piutang Perpajakan

Piutang Perpajakan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Piutang Perpajakan TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Piutang Bukan Pajak
Rp0

C.1.5. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Piutang PNPB	0	0
Piutang Lainnya	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)
Rp20.790.650

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.20.790.650 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel xx
Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Pengembalian Belanja Pegawai	3.298.950	0
2	Pengembalian Belanja Barang	17.491.700	0
	Total TGR	20.790.650	0

Bagian Lancar
 Tagihan Penjualan
 Angsuran
 Rp0

C.1.7. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023

Penyisihan Piutang
 Tidak Tertagih –
 Piutang Jk. Pendek
 Rp0

C.1.8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Pendek
(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	0		0
Kurang Lancar	0		0
Diragukan	0		0
Macet	0		0
Jumlah	0		0
Piutang Bukan			



Pajak			
Lancar	0		0
Kurang Lancar	0		0
Diragukan	-		-
Macet	-		-
Jumlah	0		0
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	0		0
Kurang Lancar	0		0
Diragukan	-		-
Macet	-		-
Jumlah	0		0
Bagian Lancar TPA			
Lancar	0		0
Kurang Lancar	0		0
Diragukan	-		-
Macet	-		-
Jumlah	0		0
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0		0

Beban Dibayar di Muka
Rp30.258.600

C.1.9. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp30.258.600 dan Rp0. Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Beban Dibayar di Muka Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong per 31 Desember 2024 adalah langganan starlink mulai dari 01 November 2023 s.d 31 Oktober 2024. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pembayaran Sewa Internet	30.258.600	0
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	0	0
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	0	0
Jumlah	30.258.600	0

Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Rp0

C.1.10. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel xx
Perbandingan Rincian Pendapatan yang
Masih Harus Diterima
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Jasa Lainnya	0	0
Pendapatan Pemeriksaan Lab Mutu	0	0
Jumlah	0	0

Persediaan

Rp92.560.422

C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 92.560.522 dan Rp81.083.309 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2024	Tahun 2023
Persediaan Barang Konsumsi	8.245.160	81.083.309
Bahan untuk Pemeliharaan	61.400	
Suku Cadang	436.350	
Bahan Baku	83.817.512	
Jumlah	92.560.422	81.083.309

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap

Rp2.204.650.852

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp2.204.650.852 dan Rp4.145.468.378 Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.



Tanah

Rp0

C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp256.404.000. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	256.404.000
Pembelian	0
Revaluasi Aset	0
Penghapusan	256.404.000
Saldo Per 31 Desember 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	0

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Tanah TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	450 m ²	Jl. Cokran – Manokwari	0
2		(Peralihan Aset ke BKI)	
3			
4			
Jumlah			0

Tanah seluas 4.50 m² yang terletak di Jl. Cokran – Manokwari digunakan untuk Wilker Manokwari telah serahkan ke Badan Karantina Indonesia Papua Barat

Peralatan dan Mesin

Rp5.136.427.033

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp5.136.427.033 dan Rp5.730.162.158.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:



Tabel xx
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	5.730.162.158
Pembelian	0
Hibah	
Transfer Masuk	85.194.000
Koreksi Tambah	
Penghentian aset dari penggunaan	
Saldo Per 31 Desember 2024	5.136.427.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	5.136.427.000

Gedung dan Bangunan
Rp1.479.924.000

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.479.924.000 dan Rp3.201.313.000. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2024
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	3.201.313.000
Pembangunan Gedung	0
Mutasi Kurang:	(1.721.389.000)
Saldo Per 31 Desember 2024	1.479.924.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	1.479.924.000

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp140.667.000

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp140.667.000 dan Rp140.667.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	140.667.000
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	0
Koreksi Pencatatan	-
Saldo Per 31 Desember 2024	140.667.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	140.667.000



Mutasi tambah:

Berupa penambahan jaringan teknologi informasi dalam rangka mempercepat pelaporan keuangan secara elektronik. Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Aset Tetap Lainnya
Rp55.400.000

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp55.400.000 dan Rp55.400.000 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	55.400.000
-	-
-	-
Saldo Per 31 Desember 2023	55.400.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	55.400.000

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 .

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp4.607.767.181

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.607.767.181 dan Rp5.238.477.780. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024.



Tabel xx
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	5.136.427.033	4.292.355.201	5.136.427.033
2.	Gedung dan Bangunan	1.479.924.000	259.835.198	1.479.924.000
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	140.667.000	55.576.782	140.667.000
4.	Aset Tetap Lainnya	55.400.000	0	55.400.000

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Piutang Jangka Panjang
Rp0

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Rp20.790.650

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp20.790.650 dan Rp0. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Piutang Tagihan TP/TGR TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Pengembalian Belanja Pegawai	3.298.950	0
2	Pengembalian Belanja Barang	17.491.700	0
	Jumlah	20.790.650	

Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, berupa penjualan aset tetap



yang pembayarannya diselesaikan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian TPA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Piutang TPA TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023

Piutang Jangka

Panjang Lainnya Rp0

C.3.3. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023

Penyisihan Piutang

Tidak Tertagih –

Piutang Jangka

Panjang Rp0

C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.



Tabel xx
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.
Panjang
TA 2024

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar			
Kurang Lancar			
Diragukan			-
Macet			-
Jumlah			
Tagihan TPA			
Lancar			
Kurang Lancar			
Diragukan	-		-
Macet	-		-
Jumlah	0		0
Piutang Jangka Panjang Lainnya			
Lancar	0		0
Kurang Lancar	0		0
Diragukan	-		-
Macet	-		-
Jumlah	0		0
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0		0

Aset Lainnya
Rp55.400.000

C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp55.400.000 dan Rp55.400.000. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset LAINLAIN.

Kemitraan dengan
Pihak Ketiga
Rp0

C.4.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Nilai perolehan Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Kemitraan dengan Pihak Ketiga digunakan untuk mencatat perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki Adapun mutasi transaksi Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut.



Tabel xx
Rincian Mutasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	0
Pembelian	0
Saldo Per 31 Desember 2024	0
Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	0

Mutasi tambah: -

Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga TA 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai

Aset Tak Berwujud
Rp0

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Adapun mutasi transaksi Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut.

Tabel xx
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	0
Pembelian	0
Saldo Per 31 Desember 2024	0
Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	0

Mutasi tambah -

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Aset Tak Berwujud TA 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai



Aset LAINLAIN

Rp0

C.4.2. Aset LAINLAIN

Aset LAINLAIN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Aset LAINLAIN berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong. Adapun mutasi Aset LAINLAIN adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Aset LAINLAIN
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	0
Reklasifikasi dari Aset Tetap	0
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
Penghapusan BMN	0
Saldo Per 31 Desember 2024	0
Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	0

Transaksi penambahan dan pengurangan aset LAINLAIN dapat dijelaskan sebagai berikut :-

Rincian Aset LAINLAIN berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi

Penyusutan dan

Amortisasi Aset

Lainnya Rp0

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset
Lainnya TA 2024

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
	Jumlah	0	0	0
B.	Aset LAINLAIN		0	0
	Jumlah	0	0	0
	Total	0	0	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.



Kewajiban Jangka
Pendek
Rp11.732.764

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp11.732.764 dan Rp17.172.046.

Uang Muka dari
KPPN Rp0

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp11.732.764

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp11.732.764 dan Rp17.172.046. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	0
2.	Potongan Pajak yang belum disetor	0
3.	Utang kepada Pihak Ketiga	11.732.764
Total		11.732.764

Pendapatan Diterima
di Muka Rp0

C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK.

Tabel xx

Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023
Jumlah	0	0



Beban yang Masih
Harus Dibayar
Rp11.732.764

C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11.732.764 dan Rp14.457.410, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, berupa biaya langganan listrik sebesar Rp8.760.981, biaya langganan air Rp686.706, biaya langganan telp Rp1.260.877 dan biaya langganan internet Rp 1.024.200 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2024 dan
2023

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	17.172.046
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	11.732.764	0
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	0
Belanja Bantuan Sosial yang Masih Harus Dibayar	0	0
Jumlah	11.732.764	17.172.046

Utang yang Belum
Ditagihkan Rp0

C.5.5. Utang yang Belum Ditagihkan

Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Tabel xx
Rincian Utang yang Belum Ditagihkan TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023
Utang yang Belum Diterima Tagihannya	0	0
Jumlah	0	0

Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp0

C.5.6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Tabel xx
Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023
Jumlah	0	0

Kewajiban Jangka
Panjang Rp 0

C.6. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo lebih



dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Panjang Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Kewajiban Konsesi
Jasa Rp0

C.6.1. Kewajiban Konsesi Jasa

Kewajiban Konsesi Jasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban yang timbul dari dampak pengakuan aset konsesi jasa yang berasal dari mitra (badan usaha) sesuai dengan perjanjian konsesi jasa antara entitas pemerintah pusat dengan mitra (badan usaha).

Tabel xx
Rincian Konsesi Jasa TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023
Jumlah	0	0

Ekuitas
Rp2.315.737.110

C.7. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing- masing sebesar Rp2.315.737.110 dan Rp4.209.379.641 Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
Perpajakan
Rp0

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Perpajakan
TA 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Jumlah	0	0	0,00

Pendapatan
PNBP
Rp216.512.650

D.2 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp216.512.650 dan Rp153.475.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:



Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	20.452.000		100
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi	175.370.000	158.765.000	9.47
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	600.000		100
Penerimaan kembali Belanja Pegawai TAYL	3.298.950		100
Penerimaan kembali Belanja Barang TAYL	17.491.700		100
Jumlah	216.612.650	158.765.000	26,70

Pendapatan Hibah Rp0

D.3 Pendapatan Hibah

Jumlah Pendapatan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Hibah
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Jumlah	0	0	0,00

Beban Pegawai
Rp1.882.246.289

D.4 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.882.246.289 dan Rp3.156.383.305. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.



Rincian Beban Pegawai
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	927.590.704	2.109.750.140	(56,03)
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	10.269.000	26.112.523	(60,67)
Beban Lembur	86.652.000	106.075.000	(18,31)
Beban Tunjangan Khusus/Kinerja	857.734.585	914.445.642	(6,20)
Jumlah Beban	1.882.246.289	3.156.383.305	(40,36)

Beban
Persediaan
Rp92.560.422

D.5 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp92.560.422 dan Rp81.083.309. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Persediaan Konsumsi	8.245.160	0	100
Beban untuk Pemeliharaan	61.400	0	100
Suku Cadang	436.350	0	100
Beban Persediaan Bahan Baku	83.817.512	81.083.309	3,26
Jumlah Beban	92.560.422	81.083.309	12,40

Beban Barang
dan Jasa
Rp1.529.979.654

D.6 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.529.979.654 dan Rp2.017.822.207. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban LAINLAIN berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya penghematan atas beban-beban operasional perkantoran, penurunan pengiriman surat karena sudah disampaikan secara *online*.



Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Keperluan Perkantoran	743.916.619	859.514.382	(13,45)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	59.998.000	36.025.000	39,96
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	14.990.700	24.999.400	(40,03)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	61.896.000	129.468.000	(52,19)
Beban Barang Operasional Lainnya	39.568.112	142.924.300	(72,31)
Beban Bahan	133.161.180	242.333.018	(45,05)
Beban Honor Output Kegiatan	0	6.710.000	(100)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	13.500.000	(100)
Beban Langganan Listrik	105.062.760	146.416.434	(28,24)
Beban Langganan Telepon	1.260.877	7.471.094	(83,12)
Beban Langganan Air	11.817.006	15.961.400	(25,96)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	4.993.869	(100)
Beban Sewa	40.007.400	265.633.000	(84,94)
Beban Jasa Lainnya	318.301.000	121.873.000	(23,42)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0
Jumlah Beban	1.529.979.654	2.017.822.897	(24,18)

Beban Pemeliharaan
Rp366.554.455

5

D.7 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp366.554.455 dan Rp361.769.507. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:



Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	232.272.118	212.883.500	8,35
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	129.279.327	142.618.507	(9,35)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	5.003.010	6.267.500	(20,17)
Jumlah Beban	366.554.455	361.769.507	1,30

Perjalanan Dinas
Rp561.479.579

D.8 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp561.479.579 dan Rp751.583.421. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun dan adanya pelatihan dari Kantor Pusat yang perjalanan dinasnya ditanggung sendiri. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	312.308.051	406.505.485	(23,17)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.010.000	134.652.000	(85,14)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	229.161.528	210.425.936	8,17
Jumlah Beban	561.479.579	751.583.421	(25,29)

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp0

D.9 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Satker memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat dan pengusaha UMKM berupa bantuan peralatan dan perlengkapan untuk penerapan



akuntansi dan pelaporan. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Jumlah Beban	0	0	0,00

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.10 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Peningkatan beban bansos yang diberikan kepada kelompok masyarakat sebagai Bantuan Sosial untuk mendukung program Indonesia Pintar. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Jumlah Beban	0	0	0,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0

D.11 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp5.238.477.780. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:



Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.292.355.201	4.761.259.660	(9,85)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	259.835.198	424.518.783	(38,79)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	44.032.338	42.316.004	(3,97)
Beban Penyusutan Irigasi	4.044.443	3.466.666	(3,90)
Beban Penyusutan Jaringan	7.500.001	6.916.667	(7,78)
Jumlah Penyusutan	4.607.767.181	5.238.477.780	(12,04)
Jumlah Amortisasi	0	0	0,00
Jumlah Beban	4.607.767.181	5.238.477.780	(12,04)

Beban
Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih Rp0

D.12 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Jumlah Beban	0	0	0,00

Kegiatan Non
Operasional
Rp41.242.650

D.13 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:



Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	3.298.950	0	100
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	17.491.700	0	100
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	20.452.000	0	100
Jumlah Beban	41.242.650	0	100

Pos Luar Biasa
Nihil

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp4.209.379.64
1

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp4.209.379.641 dan Rp4.617.074.786.

Defisit LO
Rp4.433.968.90
6

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah defisit sebesar Rp4.433.968.906 dan Rp6.770.180.123. Surplus /Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi
Rp0

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0.

Penyesuaian
Nilai Aset Rp0

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.



Koreksi Nilai
Persediaan Rp0

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2024

No.	Jenis Persediaan	Koreksi
1.	Barang Konsumsi	0
2.	Suku Cadang	0
Jumlah		0

Selisih
Revaluasi Aset
Rp0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Nilai
Aset Non
Revaluasi Rp0

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2024

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
Jumlah	0

Koreksi
LAINLAIN Rp0

E.4.5. Koreksi LAINLAIN

Koreksi LAINLAIN untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Rincian Koreksi LAINLAIN adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Koreksi LAINLAIN TA 2024

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Beban	113.067
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi Hibah	0



Transaksi Antar
Entitas
Rp4.454.075.44
6

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp3.167.767.577 dan Rp4.553.341.089.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel xx
Transaksi Antar Entitas TA 2024

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	216.612.650
Ditagihkan ke Entitas Lain	4.545.075.446
Transfer Masuk	90.304.750
Transfer Keluar	1.787.441.170
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
Jumlah	6.639.434.016

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp90.304.750 terdiri dari:

Tabel xx
Transfer Masuk TA 2024

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Sertifikat KI-D1		90.304.750
Jumlah			90.304.750

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.787.441.171 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel xx
Transfer Keluar TA 2024

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin		1.787.441.171
2.	Persediaan		0
Jumlah			1.787.441.171



E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2024 dan total Rp0 yang merupakan Hibah Langsung yang Belum Disahkan dari Tahun Anggaran Yang Lalu.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Pengesahan Hibah Langsung TA 2024

No.	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
Total Pengesahan			0
Pengesahan Pengembalian Hibah			0
Jumlah			0

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Per Satker Tahun 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Ekuitas Akhir
Rp2.315.737.110

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp2.315.737.110 dan Rp4.209.379.641.



PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Pengungkapan LAINLAIN

Berdasarkan Keputusan Menteri Akuntansi Nomor: 009/BALAP.5/2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Akuntansi Nomor: 018/BALAP.5/2021 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran.

Kuasa Pengguna Anggaran : Nikmatul Rochmah, S.St.Pi
Pejabat Pembuat Komitmen : Felyanto Pabuntang, A.Md.,S.Pi
Pejabat PPSPM : Syahrul Ramadhan, S.Sos
Bendahara Pengeluaran : Marini Abbas, A.Md
Bendahara Penerimaan : Ramli

